# Pendidikan Politik Dalam Perspektif Qur`An: Implementasi Pembentukan Budaya Politik Masyarakat Beradab

#### Faelasup<sup>1</sup>, Taufik Hidayat<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta Kutai Timur

Email. Acupfaelasup465@gmail.com taufikozenk@gmail.com

#### **Abstract**

Research with the title political education in the perspective of the Qur'an: The implementation of the political culture of a civilized society is motivated by the increasingly sharp political conditions in Indonesia, so that the political aspirations conveyed by the community have seen the capacity of political channels (political parties) in society. The focus of his research is 1) The perspective of the Qur'an, 2) Channels of political education in society, 3) Building a political culture of a civilized society. The research method is library research with literature study, articles, scientific journals, and searches on qur'an interpretations related to political issues. The results of research 1) The perspective of the qur'an, that is, in tracing the Our'an, verses that reveal political problems are found. In Islam it is known as figih siyasah, which is legal knowledge derived from the Al-Qur'an and Sunnah. 2) Channels of political education have two things, firstly formal education, namely political education through formal schools, the second is community education carried out by political parties towards the community. 3) Building a political culture of a civilized society, there are many verses that lead to the formation of a political culture of a civilized society through party cadre and party socialization.

**Keywords**: Qur'anic perspective, political education, socialization channels, civilized society

### **PENDAHULUAN**

Situasi dan kondisi baru politik masyarakat Indonesia saat ini menunjukkan peningkatan yang cukup tajam (Ali, Prakoso, & Sianturi, 2021). Aspirasi politik yang disampaikan masyarakat sudah melebihi kapasitas saluran-saluran politik yang sudah ada yang sesuai undang-undang negara. Saluran-saluran politik yang dimaksud adalah, partai-partai politik, dan perwakilan daerah (Romli, 2016). Sedangkan organisasi masa (Ormas) yang sejatinya bertujuan untuk membimbing ummat dalam kemaslahatan, akan tetapi banyak yang digunakan untuk menyampaikan aspirasi politik dengan dalih demokrasi, bahkan telah mengarah pada pencapaian kekuasaan. Fenomena ini bisa kita lihat ormas-ormas seperti FPI, eks HTI, KAMI, golongan radikalis, dan intoleran, dengan dalih memperjuangkan agama dengan berusaha untuk mengganti idiologi negara. Di samping hal tersebut, masih banyak lagi contoh-contoh lain seperti fenomena pemilu, pilpres, dan pemilukada yang dilaksanakan

secara serentak diseluruh Indonesia. Pada pemilukada terebut banyak kejadian-kejadian yang berdampak negatif terhadap masyarakat, apalagi jika dikaitkan dengan pendidikan politik masyarakat, yang bertujuan untuk membangun budaya politik yang baik. Kejadian *black campain*, berita-berita bohong, pelecehan nama baik, janji palsu dari calon maupun dari tim calon peserta dan pendukung calon, telah bertebaran di tengah-tengah masyarakat dan dunia maya atau media-media sosial(Susilo, Afifi, & Yustitia, 2019). Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho mengemukakan, harus ada langkahlangkah real untuk pencegahan agar berita bohong atau hoax tidak bebas beredar yang membuat masyarakat menjadi lebih tersesat.

Politik merupakan bagian daripada kehidupan manusia untuk mensejahterakan kehidupan bermasyarakat (Namang, 2020). Jadi politik adalah sunatullah karena manusia hidup bermasyarakat akan membutuhkan pemimpin untuk hidup teratur, hidup damai dan sejahtera. Memperjuangkan ekonomi, pendidikan, budaya, agama yang syah untuk berkembang di atas bumi ini, maka perlu seorang pemimpin yang dipilih secara syah oleh rakyat. Di dalam perspektif Qur`an pemimpin adalah seorang yang menjalankan amanah dalam mewujudkan kemaslahatan ummat.

Masalah kepemimpinan ini pernah disampaikan oleh Tri Risma Harini seorang mantan wali kota Surabaya dalam pidatonya pada acara pelantikan 60 pejabat ASN dan 10 camat baru di kota Surabaya. Beliau menyebutkan dirinya sangat mencintai rakyat Surabaya, dan dikatakan juga bahwa suara rakyat merupakan suara Tuhan, dan sebagai amanah yang harus dijaga. Al-Qur`an surah Al A` Raaf Ayat: 079 menyampaikan:

Maka Shaleh meninggalkan mereka seraya berkata: Hai kaumku sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasehat kepadamu sekalian, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasehat.

Dari firman Allah SWT di atas menunjukkan bahwa Shaleh sebagai pimpinan kaumnya telah menyampaikan amanah dari Tuhannya, tinggal bagaimana ummatnya untuk menjalani. Dari penyampaian tersebut dapat dimaknai bahwa seorang pemimpin wajib menjalankan amanah Tuhan.

Fungsi partai politik sebagaimana tercantum dalam UU No. 2 Tahun 2011 yang berbunyi bahwa partai politik sebagai sarana wahana untuk sosialisasi politik bagi masyarakat, agar menjadi warga negara yang tahu akan hak dan kewajiban dalam hidup berbangsa dan bernegara. Bertambahnya jumlah partai politik dapat membawa konsekuensi nyata, bahwa rakyat (masyarakat) mempunyai wawasan yang lebih luas terhadap hal-hal yang terkait dengan kebebasan berdemokrasi. Akan tetapi, sampai saat ini peran partai politik dalam memberikan pendidikan (sosialisasi) politik terhadap masyarakat masih belum bisa dirasakan dengan maksimal.

Dari fenomena politik di masyarakat yang dapat kita lihat menunjukkan bahwa masyarakat belum faham terhadap sejatinya politik tersebut, rasa apriori seringkali terlihat, bahwa politik itu kotor, politik itu pembohong. Padahal politik itu sangat mulya berpikir tentang bagaimana upaya-upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat penuh kedamaian dan rakyat sejahtera, baik ekonomi, pendidikan, kehidupan keagamaan, dan berbudaya. Politik berkaitan dengan kekuasaan, pengaturan kewenangan, dan membuat kebijakan serta ketertiban (Mukrimaa et al., 2016). Lebih disederhanakan lagi jika antara kekuasaan (power) dengan pengaruh (influence) sangat memerlukan keseimbangan serta pada konskuensi yang ada. Dan pengaturan dan kewenangan juga harus demikian, dan di samping itu ketaatan dan ketertiban adalah akibat daripada tujuan. Jadi dengan demikian, politik atau hal-hal yang berkaitan dengan politik akan terkait dengan tiga hal utama: kekuasaan (power), kewenangan (authority), dan ketaatan atau ketertiban (order) (Supriadi, 2020). Dari penyampaian di atas, maka terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang perlu diungkap dalam penelitian kepustakaan ini yaitu, 1) pendidikan politik dalam pespektif Qur'an, 2) saluran pendidikan politik yang dilakukan terhadap masyarakat, dan, 3) membangun budaya politik masyarakat beradab.

## **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *liberary research* dengan melakukan studi kepustakaan. Sedangkan studi yang dilakukan adalah studi literatur, artikel, jornal ilmiah, penelusuran tafsir Qur`an yang terkait dengan masalah-masalah politik serta pendidikan politik. *Liberary Research* mendeskripsikan hasil secara substanstif dengan data-data naratif bukan dengan data-data kuantitatif atau dengan angka-angka. Sedangkan analisis menggunakan studi literatur, dan jornal,

artikel, dan literatur dijadikan sebagai data-data penelitian (Fadli, 2021). Penulusuran dan penggalian terhadap tafsir-tafsir yang digunakan adalah kitab-kitab tafsir kontemporer.

#### Pembahasan

## 1. Pendidikan politik dalam persepektif qur'an

Berkaitan dengan pendidikan politik dalam perspektif quran ini, peneliti melakukan penulusuran ayat-ayat Qur`an yang sesuai untuk dijadikan dasar-dasar pandangan terhadap pendidikan politik. Ayat-ayat tersebut adalah:

NO	NAMA SURAT	AYAT
1	Al-Alaq	1
2	An-Nahl	103
3	Ali-Imran	37

Bacalah, dengan menyebut nama Tuhanmu Yang menciptakan (Al-Alaq ayat 1).

Lafadz bacalah menunjukkan pengertian yang luas. Lafadz tersebut menyuruh agar kita lebih peka terhadap persoalan yang akan terjadi. Dalam bahasa yang lain bahwa lafadz bacalah tersebut menyuruh manusia untuk melakukan proses pembelajaran terhadap realitas kehidupan yang ada.

Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya Muhammad. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya bahasa Ajam, sedang Al-Qur'an adalah dalam bahasa Arab yang terang (An-Nahl ayat: 103)

Dalam tafsir jalalain diterangkan bahwa seorang pendeta Nasrani yang pernah dikunjungi Nabi Muhammad SAW, mengatakan bahwa Muhammad rasulullah belajar Al-Qur`an kepadanya. Kemudian Allah SWT menyangga melalui firmanya, "Rasulullah belajar kepada pendeta tersebut tentang Bahasa ajam "sedangkan Al-Qur`an itu sendiri berbahasa Arab. Proses belajar Al-Qur`an Rasulullah langsung kepada Allah SWT. Sedangkan proses belajar bahasa ajam Rasulullah diajarkan oleh pendeta Nasrani tersebut, dengan demikian proses belajar ini wajib dijalani oleh manusia, dan proses belajar merupakan bagian daripada pendidikan, oleh karena

itu pendidikan tersebut hal yang utama dalam kehidupan manusia.

Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang sangat baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata: Hai Maryam dari mana kamu memperoleh makanan ini? Maryam menjawab; Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab (Ali-Imran ayat: 37)

Allah SWT menerima Mariam sebagai nazar dari ibunya, dan Allah mendidiknya terutama pendidikan akhlaknya, di samping itu sangat diperhatikan kesehatan dan perkembangan jasmani daripada Mariam. Sedangkan Allah SWT menetapkan Zakaria sebagai pengasuhnya. Kemudian di dalam pembahasan pendidikan politik, dengan pemahaman yang universal bahwa pendidikan politik memiliki pengertian yang terpisah antara istilah dalam pendidikan dan istilah di dalam politik. Pendidikan merupakan usaha sadar manusia untuk melakukan perubahan terhadap manusia lain yaitu tentang perubahan koqnitif (pengetahuan), apektif (perilaku), dan motorik (keterampilan), yang asalnya tidak tahu akhirnya menjadi tahu, yang semula tidak bisa kemudian menjadi bisa, yang asal mulanya tidak mengerti pada akhirnya menjadi mengerti, dan yang semula kurang berakhlak berubah menjadi berakhlak (Maâ, 2018). Menurut (Darmiyati, n.d.) pendidikan diistilahkan dengan kata education yang memiliki kesamaan dengan pengajaran, pelatihan, dan pembelajaran. Sedangkan di dalam Qur'an ayat yang berbunyi "bacalah" sebuah seruan dari Tuhan untuk manusia agar melakukan pembelajaran terhadap realitas hidup, dengan indera yang dimiliki dan dengan kemampuan fisik, psikhis, serta biologis. Jadi pembelajaran itu termasuk di dalam bagian pendidikan, sehingga yang dimaksud melakukan pembelajaran terhadap realitas kehidupan merupakan bentuk dari pendidikan tentang hidup, baik bidang ekonomi, sosial, agama, dan politik secara non formal.

Politik merupakan kejadian, atau proses yang terjadi di dalam masyarakat tentang kekuasaan dan pemerintahan, yang tujuannya adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat(Sutrisman, 2019). Terdapat ayat-ayat Qur'an yang berkaitan dengan politik, sebagai hasil dari penulusuran Our'an, dalam hal ini ditampilkan 5 ayat dari 10 ayat hasil penulusuran, yakni antara lain:

NO	NAMA SURAT	AYAT	JUMLAH
1	Al-Baqarah	30	1
2	Al-A`Raaf	129	1
3	An-Naml	62	1
4	Faathir	39	1
5	Shaad	26	1
6	Al-Baqarah	124	1
7	An-Nahl	120	1
8	Al-Furqan	74	1
9	An-Nisaa	59	1
10	An-Nisaa	83	1
	Jumlah		10

Siapakah yang memperkenankan do'a orang yang dalam kesulitan apabila ia berdo'a kepada-Nya? dan yang menghilangkan kesusahan? dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingati (Nya). (An-Naml ayat: 62)

Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya, dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata: Dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman; Janji-Ku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim.(Al-Baqarah ayat : 124).

Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. (An-Nahl ayat: 120).

Hai orang-orang beriman ikutilah Allah dan ikutillah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Qur'an) dan Rasul (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.(An-Nisa ayat: 59).

وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ عَلَى وَلُو رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أُولِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنُبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطِنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antaramu.(An-Nisa ayat : 83).

Di dalam Islam, politik dikenal dengan istilah fiqih siasyah atau hukum-hukum Islam yang berkenaan dengan praktisi politik di dalam kehidupan masyarakat. Secara bahasa fiqih terdapat kesamaan dengan pemahaman agar mengetahui. Sedangkan fiqih secara istilah ialah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktik) yang diperoleh dari dalil tafshili (detail), yakni hukumhukum khusus yang diambil dari Qur'an dan Sunnah. Jadi figh adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh ahli hujjah melalui jalan penalaran rasional dan ijtihad. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, mengelola, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik(Erick & Masyitah, 2020). Dengan pemahaman yang hampir sama yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur, mengelola, atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan masyarakat.

Pemahaman yang lebih mudah, menjelaskan bahwa fiqih siyasah merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum dan politik untuk mengatur, mengurus, mengelola, memimpin, membuat kebijakan dan pemerintahan, sedangkan muaranya adalah kepentingan rakyat atau masyarakat. Masyarakat perlu pemimpin yang mengatur tata cara dalam kehidupan bersama, sehingga hidup menjadi teratur, dan ada yang memimpin agar masyarakat mudah diatur dan diarahkan. Kehadiran pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan oleh rakyat (masyarakat), sedangkan pemerintah mengatur rakyatnya dengan kebijakankebijakan dan produk hukum yang sangat dibutuhkan oleh rakyat itu sendiri. Contoh konkrit yang terjadi di dalam masyarakat, misalnya bagaimana masa depan rakyat (masyarakat) mengenai masalah-masalah ekonomi, pendidikan,

kehidupan bersama, dalam melaksanakan kehidupan beragama, dan berbudaya serta berpolitik. Pemerintah yang memiliki kekuasaan (*power*), pengaruh (*influence*), kewenangan (*authority*), dan ketertiban (*order*). Berkaitan dengan hal ini pemerintah sangat berkewajiban untuk memenuhi keinginan-keinginan rakyat (masyarakat) dalam mencapai kehidupan masa depan yang lebih baik, tentram, damai, dan sejahtera(Budiarjo, 2007).

Terdapat dua pendekatan dalam mendifinisikan politik menurut (Rahmatunnisa, 2013), *pertama*, menentukan bidang penelitian dengan merujuk pada institusi tertentu ke dalam tiga pendekatan yaitu teori behavioris, teori pilihan rasionalistik, dan teori analisis institusional, yang didedikasikan untuk melakukan praktik politik dalam pemerintahan. *Ke dua*, mendefinisikan politik sebagai suatu proses sosial masyarakat yang dapat diamati melalui bermacam pendekatan. Politik itu lebih dari sekedar tentang apa yang seharusnya dilakukan, dan apa yang semestinya tidak dilakukan pemerintah, dan juga tentang tidak keseimbangan pembagian kekuasaan dengan rakyat (masyarakat), berjuang bagaimana cara yang baik untuk mendapatkan kekuasaan, dan bagaimana kemungkinan dampaknya terhadap penciptaan dan pembagian modal sosial, kesempatan hidup, dan kesejahteraan.

Gabriel Almond dalam Andrews & Mas'oed menjelaskan bahwa pengertian pendidikan politik, dapat juga disebut sebagai sosialisasi politik yang dikhususkan untuk menumbuhkan nilai-nilai politik, dan mengarahkan bagaimana seharusnya masing-masing masyarakat dapat berpartisipasi untuk melaksanakan sistem politik tersebut(Aderibigbe, 2018). Plano dalam Affandi menyebutkan bahwa pengenalan politik sebagai suatu proses pembelajaran. Melalui proses pembelajaran tersebut, individu diharapkan dapat memperoleh orientasi politik, baik berupa keyakinan, perasaan maupun komponen nilai tentang pemerintah dan kehidupan politik sebagai warga negara. Pendidikan politik memiliki peranan yang penting dan strategis bagi kelangsungan hidup bagi generasi baru dalam suatu organsiasi politik, dan tentunya juga bagi perpolitikan di suatu negara merdeka. Melalui kegiatan pendidikan politik tersebut, anggota organisasi politik, termasuk juga masyarakat yang tidak tergabung sebagai anggota partai politik akan mendapatkan transfer atau tambahan nilai dan warisan nilai-nilai dari generasi sebelumnya, yang sudah terlebih dahulu berkecimpung dalam urusan

politik (Idris, 2014). Menurut Surono dalam Ramdlang Naning bahwa pendidikan politik sebagai bentuk usaha masyarakat, dalam arti mencerdaskan kehidupan politik masyarakat, meningkatkan kesadaran anggota masyarakat terhadap kepekaan dan kesadaran akan hak dan kewajiban, serta bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara.

Merujuk teori-teori yang telah diuraikan tersebut, memberikan pandangan bahwa pendidikan politik bagi masyarakat sangat penting dan vital. Karena masyarakat akan melakukan proses pembelajaran politik, yaitu transfer nilai-nilai demokrasi dalam berbangsa dan bernegara, ke dalam realitas kehidupan seharihari bagi masyarakat atau rakyat di suatu negara. Dengan demikian masyarakat atau rakyat dapat memahami bagaimana sejatinya pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dengan benar dan tanggung jawab. Dan juga bagaimana rakyat melaksanakan kehidupan sebagai masyarakat yang dipimpin dengan benar dan bertanggung jawab pula. Keterkaitannya dengan hal ini ialah, Islam memahami dan sangat toleran terhadap apa yang disebut kekuasaan, pemerintahan, demokrasi dan bernegara. Firman Allah SWT Surat An-Nisa ayat 58

Sesungguhnya Allah mengutus kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dijelaskan dalam tafsir jalalain bahwa menyampaikan amanah adalah kewajiban mutlak yang dipercayakan dari seseorang atau masyarakat kepada yang berhak untuk menerimanya. Ayat ini turun di Mekah saat pembebasan kota Mekah oleh Islam. Ali. Ra. Mengambil kunci ka`bah pada Usman Bin Talhah Al-Hajabi, akan tetapi Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Abi Tahlib untuk mengembalikan kunci ka`bah tersebut kepada Usman Bin Talhah, karena Usman Bin Talhah sudah lama sebagai penjaga ka`bah. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah dengan keadilan. Meski ayat ini bersifat sebab khusus, akan tetapi hal ini bisa diberlakukan untuk umum, karena penggunaan damirnya adalah damir jamak.

Dari contoh ayat-ayat ini menunjukkan, bahwasannya pemimpin, dan

kepemimpinan, serta kekuasaan sangat dibutuhkan oleh komunitas masyarakat atau rakyat. Pemimpin bertugas memberikan perlindungan, pengayoman, membimbing, mengarahkan, baik dibidang ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan politik, serta menegakkan keadilan juga menjamin rasa aman terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Dengan penulusuran terhadap konten Al-Qur`an sangat banyak ditemukan ayat-ayat yang berkait erat dengan implementasi politik dan demokrasi di masyarakat, tidak terdapat satu ayatpun yang bertentangan dengan hal ini, baik itu dalam literatur-literatur hasil kajian para ahli tafsir yang sudah masyhur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perspektif Al-Qur`an terhadap implementasi pendidikan politik pada masyarakat sangat mendapat dukungan, akan tetapi implementasi pendidikan politik yang dimaksud adalah politik yang penuh keberadaban sehingga dapat menghadirkan kemaslahatan pada umat, bukan menhadirkan kemudlaratan yang dapat menambah kerusakan pada alam yang kita miliki.

## 2. Saluran-saluran Pendidikan Politik Pada Masyarakat

Saluran pendidikan politik di masyarakat terdapat dua bagian penting yaitu:

### a) Pendidikan formal

Sosialisasi politik melalui saluran pendidikan formal yaitu melalui mata pelajaran PPKN dan sejarah Indonesia di tingkat SLA. Sedangkan bentuknya adalah pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, atau lebih tepatnya adalah diberikan melalui kurikulum sekolah yakni intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk ekstrakurikuler terdapat materi empat pilar yaitu terdiri dari pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunnggal Ika. Untuk materi empat pilar tersebut terdapat lomba empat pilar isinya pancasila, UUD 1945, pancasila, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, di tingkat SLA (SMA, SMK, MA, dan MAK), dan diberlakukan secara nasional. Sehingga urutan tingkat lombanya adalah lomba di tingkat kabupaten untuk semua sekolah tingkat SLA, tingkat provinsi, dan tingkat nasional.

Untuk tingkat perguruan tinggi terdapat mata kuliah kwargaan negara, sedangkan di tingkat universitas terdapat Fakultas Ilmu Politik. Sudah sangat banyak output atau para sarjana lulusan Fakultas Ilmu Politik, serta para sarjana politik yang telah tersebar di seluruh Indonesia. Dengan demikian sudah banyak para akademisi dan para praktisi politik yang aktif di lembaga negara seperti

DPR, DPRD dan Dewan Perwakilan Daerah, di samping itu tidak sedikit pula yang aktif di pemerintahan.

### b. Sosialisasi Melalui Pendidikan Masyarakat

Sosialisasi atau pendidikan politik yang dilakukan langsung kepada masyarakat dengan wadahnya partai politik. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No 2 tahun 2011 yakni dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas melalui partai politik. Tujuannya adalah untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang politik sehingga masyarakat dapat memahami politik dengan baik, dan dapat mengabdikan diri kepada bangsa dan negara dengan baik dan bertanggung jawab.

Menurut Wasburn&Covert, sosialisasi (pendidikan) politik dilaksanakan mulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga, sekolah, tempattempat ibadah, tempat kerja, dan dalam kelompok sosial serta media. Masingmasing perseorangan maupun kelompok memiliki peran yang cukup besar dalam membetuk sikap dan perilaku politik bagi warga negara. Sosialisasi yang sering dilakukan adalah pembinaan partai politik terhadap kader-kader partai dalam menjalani kehidupan politik dan demokrasi terhadap negara. Pembinaan kader ini sangat penting bagi partai politik, karena menentukan masa depan partai sehingga perjuangan yang dijalankan sesuai dengan tujuan partai yang menaunginya. Pelaksanaan pemilu legislatif, pemilukada, dan pilpres, serta pesta demokrasi yang sekaligus sebagai wadah sosialisasi pendidikan politik terhadap rakyat. Dan juga yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ini yakni panitiapanitia ad-hoc seperti menjadi anggota KPU baik KPPS maupun PPS di daerah, dan juga sebagai anggota panwaslu di tingkat daerah.

Kegiatan pileg, pilkada, dan pilpres, dengan kegiatan-kegiatan kampanye yang digelar merupakan kegiatan yang berpengaruh langsung terhadap pemahaman masyarakat, karena kegiatan-kegiatan tersebut adalah wadah dan penyaluran pendidikan politik dari partai kepada masyarakat. Maka instrumen penunjangnya dalam hal ini undang-undang politik harus kuat dan tidak bersifat absurd. Karena politik adalah amanah yang harus dijalankan sesuai dengan amanah rakyat yang termaktub dalam UUD 1945.

Di dalam Qur`an telah difirmankan dalam surah Al-A`Raaf ayat 79. Sedangkan dalam Sahih Bukhari disebutkan, telah diceritakan kepada kami [Muhammad bin

Al-Alaa'] telah diceritakan kepada kami [Abu-Usamah] dari [Buraid bin -Abdullah] dari [Abu Burdah] dari [Abu Musa] dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: Seorang bendahara muslim yang amanah adalah orang yang melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan seolah Beliau bersabda: Dia melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya dengan sempurna dan jujur serta memiliki jiwa yang baik, dia mengeluarkannya (shadaqah) kepada orang yang berhak sebagaimana diperintahkan adalah termasuk salah satu dari Al-Mutashaddigin.

Miriam Budihardjo mengatakan bahwa sistem politik, dalam partai politik adalah bagian dari infrastruktur politik yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, berupa dukungan, keluhan ataupun tuntutan. Infrastruktur politik ialah kehidupan politik yang berlangsung melalui organisasi sosial politik. Partai politik sebagai infrastruktur politik bagi masyarakat harus mampu menunjukkan sebagai partai politik yang bersih, amanah, berjuang demi negara, setia terhadap hukum yang berlaku, sesuai dengan UUD 1945, dan Pancasila sebagai idiologi bangsa. Meskipun menjadi partai oposisi maka tetap dalam koridor UUD 1945, UU negara yang syah, UU politik yang berlaku, sesuai dengan idiologi Pancasila, maka kehadiranya adalah sebagai penyeimbang yang benar, bukan sebagai musuh negara.

#### 3. Membangun Budaya Politik Masyarakat Beradab

Mendidik dan membimbing masyarakat tentang budaya politik dalam kehidupan masyarakat itu sangat baik dan terpuji. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku bahwa partai politik sebagai wadah untuk menyalurkan sosialisasi politik kepada masyarakat luas. Dari fenomena politik masyarakat di Indonesia dapat dilihat baik dari media-media cetak, maupun media-media elektronik menggambarkan bahwa nilai-nilai politik dan demokrasi masyarakat telah mengalami destruktif, atau tergesernya nilai-nilai keadaban masyarakat sebagai umat manusia. Dalam media cetak, media elektronik, maupun medsos banyak tersebar berita-berita bohong, hoaks, berita-berita manipulatif, menghina, menghasut sudah tidak ada yang tabu untuk dilakukan. Tindak perlawanan terhadap pemerintah yang syah dengan dalih bela agama, tidak sedikit para eksekutif dan legislatif yang terlibat sekandal korupsi, konspirasi politik utuk saling menjatuhkan. Banyak terjadi diseputaran kehidupan kita.

Dengan kondisi yang demikian masyarakat cenderung mengalami kejenuhan yang cukup terhadap perlakuan politik itu sendiri, sehingga masyarakat menjadi apriori terhadap pelaku politik, baik personal maupun kelompok.

Polarisasi yang terjadi di masyarakat juga akibat benturan-benturan kepentingan politik, sedangkan masyarakat ikut terpolarisasi karena saluran sosialisasi politik atau pendidikan politik melalui partai akan lebih cepat diterima serta lebih cepat berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Apabila para pemimpin banyak berkatan bohong, janji palsu, menebarkan hoaks dalam berpolitik atau berkampanye, berkhianat (tidak jujur), maka sangat mudah berpengaruh terhadap konstetuen (pengikutnya).

Dalam penulusuran Al-Qur'an banyak ditemukan ayat yang terkait dengan masalah berperilaku (beretika) baik dalam kehidupan berekonomi, dan berpolitik, misalnya bicara tidak jujur, berkhianat (bohong), menghasut orang lain, menjelekkan lawan, membuat berita-berita hoaks dsb. Ayat-ayat pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

Dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.(Al-Anfaal Ayat: 58)

Bukanlah demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang telah dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.(Ali-Imran Ayat: 76)

Konsep Al-Qur`an di atas sangat universal, dikarenakan pesan ayat-ayat Qur`an tersebut bukan saja ditujukan untuk Muhammad seorang, melainkan untuk seluruh umat di dunia. Apabila amanah ini dapat dilaksanakan oleh umat manusia paling tidak bagi umat muslim, maka kemaslahatan laksana lautan luas yang airnya tak pernah kering untuk menyirami bumi Tuhan. Dengan demikian apa yang disebut Islam sebagai rahmatan lil alamin akan terwujud.

#### **KESIMPULAN**

Paparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendidikan (sosialisasi) politik dalam persepektif Qur'an

Pendidikan politik tidak semerta-merta tertulis secara implisit, tetapi tertulis secara terpisah, dan ayat-ayat yang terkait dengan masalah-masalah pendidikan itu cukup banyak, misalnya kata iqra bismi Rabbikal ladi kholaq. Pengertian bacalah pemaknaanya identik dengan belajar, Allah mengajarkan manusia dengan kalam, Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Sedangkan politik dalam Al-Qur`an tertulis dengan istilah yang lain, tetapi pemaknaannya meliputi masalah-masalah yang berkaitan dengan politik seperti kata khalifah, imam, dan ulil amri yang kesemuanya membahas tentang pemimpin, pemerintah, dan kekuasaan. Selain itu diajarkan tentang kejujuran dan mengemban amanah bagi pemimpin karena suara rakyat adalah suara Tuhan.

### 2. Saluran-saluran pendidikan politik di masyarakat

Terdapat dua saluran pendidikan politik yaitu; *Pertama* saluran pendidikan formal di sekolah menengah seperti mata pelajaran pancasila, kewargaan negara, dan sejarah. Sedangkan di perguruan tinggi terdapat sekolah tinggi ilmu politik, bahkan dikelas Universitas terdapat Fakultas Ilmu sosial dan Politik. Di samping itu pendidikan ekstrakurikuler seperti kegiatan empat pilar. *Kedua* pendidikan masyarakat yakni pendidikan politik langsung kepada masyarakat melalui partai politik. Hal ini berdasarkan UU No 2 tahun 2011. Contohnya diklat pengkaderan partai, kegiatan kampanye, kegiatan pemilu baik pilpres, pileg, dan pemilukada.

### 3. Membangun budaya politik masyarakat beradab

Yaitu pembelajaran bagi masyarakat bagaimana berpolitik dan berdemokrasi dengan baik, maka pimpinan partai atau kader-kader partai harus mampu menunjukkan keteladanan yang baik. Misalnya bicara tidak membohongi rakyat, tidak menciptakan kegaduhan. Mampu menjadi panutan masyarakat sehingga masyarakat mentransfernya ke dalam realitas kehidupan yang sebenarnya yaitu memiliki adab dan peradaban serta bisa menghadirkan masyarakat yang cerdas dan beradab.

#### **REFERENSI**

- Aderibigbe. (2018). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. Energies, 6(1), 1-8. Retrieved from http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.reuma.2018.06.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.044%0Ahttps://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1063458420300078?token=C039B8B13922A2079230DC9AF11A333E295FCD8
- Ali, I. M., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Strategi Pertahanan Laut dalam Menghadapi Ancaman Keamanan maritim di Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 6(2).
- Budiarjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revi; M. Riyadh, Ed.). Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Darmiyati, D. (n.d.). Pendidikan Karakter. Universitas Lambung Mangkurat.
- Erick, B., & Masyitah, M. (2020). Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Perspektif Siyasah Syar'iyyah. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 3(2), 200–212.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21*(1), 33–54.
- Idris, S. (2014). *Demokrasi dan Filsafat Pendidikan (Akar Filosofis dan Implikasinya dalam Pengembangan Filsafat Pendidikan*). Ar-Raniry Press.
- Maâ, S. (2018). Telaah Teoritis: Apa Itu Belajar? *HELPER: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 35(1), 31–46.
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., غىان, ... Harmianto, S. (2016). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 6(August), 128.
- Namang, R. B. (2020). Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 247–266.
- Rahmatunnisa, M. (2013). Analisa Kritis Atas Good Governance. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM, 2*.
- Romli, L. (2016). Reformasi partai politik dan sistem kepartaian di indonesia. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 2(2).
- Supriadi, S. (2020). Model Komunikasi Politik di Era Dunia Virtualitas. *RETORIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 2(1), 51–65.
- Susilo, M. E., Afifi, S., & Yustitia, S. (2019). *Mengurai Hoax Merajut Persatuan*. LPPM UPN" Veteran" Yogyakarta.
- Sutrisman, D. (2019). *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Guepedia.